

TINJAUAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK STUDI KASUS: RSJ SOEHARTO HEERJAN 2010-2013

Hendra F Santoso

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana

ABSTRACT

The public sector concerned with providing basic government services, as the police, military, public roads, public transit, primary education and health care for the poor. The public sector organization can be one of two types either funded directly by the government or publicly owned where a majority of the organization's shares are owned by the government. A hospital is a health care institution providing patient treatment with specialized staff and equipment. A mental hospital is a hospital for mentally incompetent or unbalanced person. Hospital administrations are individuals or groups of people who act as the central point of control within hospitals. There are two types of administrators, generalists and specialists. Generalist are individuals who are responsible for managing or helping to manage an entire facility. Specialist are individuals who are responsible for efficient operations or specific department such as policy analysis, finance, budgeting, accounting etc. Accounting is the system of recording and summarizing business and financial transactions and analysing, verifying and reporting the result. According Encyclopedia of accounting systems, three reports of a hospital will include a balance sheet, a statement of activity, and a cash flows statement at the minimum. The object of this study is the financial statements RSJ Soeharto Heerjan. This study uses descriptive method where information collected through website RSJ Soeharto Heerjan and RSJ Soeharto Heerjan. The purpose of this study is to know the financial reporting RSJ Soeharto Heerjan 2010 – 2013. Results of this study showed that the report has been made of RSJ Soeharto Heerjan are Statement of Budget Realization, Balance Sheet, Statement of Activity, Cash Flows Statement and Notes to the Financial Statements and Performance Reports. Based on the results of the review, the report RSJ Dr. Soeharto Heerdjan has implemented Government Accounting Standards showed through Statement of Budget Realization and Performance Reports. RSJ Dr. Soeharto Heerjan has implemented Statement of Financial Accounting Standards No 45 showed through Balance Sheet, Statement of Activity, Cash Flows Statement and Notes to Financial Statements.

Keywords: The Public Sector, A Hospital, The Financial Reporting, GAS, FAS No 45

PENDAHULUAN

Menurut WHO sebagaimana yang termuat dalam WHO Technical Report Series No. 122/1957: "Rumah sakit adalah bagian integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan kesehatan paripurna, kuratif, dan preventif kepada masyarakat, serta pelayanan rawat jalan yang diberikannya guna menjangkau keluarga di rumah. Rumah sakit juga merupakan pusat pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta pusat penelitian bio-medik.

Fungsi utama rumah sakit adalah sebagai sarana layanan kesehatan maupun bagian mata rantai rujukan layanan kesehatan. Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu serta teknologi kedokteran, rumah sakit telah berkembang dari suatu organisasi kemanusiaan, keagamaan, dan sosial yang murni, menjadi suatu organisasi yang lebih mengarah dan lebih berorientasi kepada "bisnis", terlebih setelah para pemodal diperbolehkan untuk mendirikan rumah sakit dibawah badan hukum yang bertujuan mencari profit. Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang padat modal, padat karya, dan padat ilmu serta

teknologi, dimana untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi, diperlukan profesionalisme yang andal dalam hal pengelolaan organisasi bisnis yang modern.

Kewajiban setiap insan kesehatan adalah mensosialisasikan pengertian rumah sakit sebagai "unit Susio-Ekonomi", sehingga persepsi masyarakat bisa berubah. Sosialisasi dikalangan insan kesehatan sendiri dan para insan rumah sakit sangat diperlukan. Sebagai contoh, para dokter dan para perawat tidak boleh menganggap rumah sakit sebagai lahan untuk mencari nafkah semata, apalagi rumah sakit dianggap sebagai tambang emas untuk menghimpun kekayaan. Rumah sakit sebagai lahan pengabdian profesinya masing-masing merupakan pengabdian yang sepatutnya bagi setiap insan kesehatan atau insan rumah sakit.

Secara operasional manajemen keuangan di Rumah Sakit harus dapat menghasilkan data, informasi dan petunjuk untuk membantu pimpinan Rumah Sakit dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan agar mutu layanan dapat dipertahankan/ditingkatkan pada tingkat pembiayaan yang wajar. Untuk itu rumah sakit perlu membuat Pelaporan Keuangan Rumah Sakit.

Sektor publik adalah tugas utama pemerintah, di sebagian besar negara sektor publik mencakup layanan publik seperti polisi, militer, jalan umum, angkutan umum, pendidikan dasar dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Rumah sakit adalah sebuah organisasi layanan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter-dokter dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit yang khusus untuk perawatan orang yang sakit jiwa.

Dalam peraturannya, rumah sakit dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Rumah Sakit yang Dikelola Pihak Swasta (*Private Hospital*)

Dalam hal ini pelaksanaan akuntansinya dilaksanakan berdasar standar akuntansi yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting Standards Board*) khususnya dalam Pernyataan (*FASB Statement*) no 17 tentang Laporan Keuangan untuk Organisasi Nirlaba. Di Indonesia praktek akuntansi yang berlaku saat ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 45, PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

2. Rumah Sakit yang Dikelola Pihak Pemerintah (*Public Hospital*)

Dalam hal ini pelaksanaan akuntansinya dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (*Governmental Accounting Standards Board*) Di Indonesia praktek akuntansi yang berlaku saat ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

Dalam pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah ada asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, dimana setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan wajib menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan dan sumber daya, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN), BLU adalah entitas akuntansi, yang

laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan, BLU adalah entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Akuntansi ialah suatu sistem yang merupakan salah satu pokok kegiatan dalam manajemen keuangan yang terdiri dari kegiatan mencatat, mengklasifikasikan dan menyimpulkan semua transaksi dan kejadian kejadian dalam suatu organisasi yang menyangkut keuangan, sehingga didapatkan suatu data atau informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Hasil akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Menurut *Encyclopedia of Accounting Systems* laporan keuangan untuk Rumah Sakit minimum terdiri dari Balance Sheet, Statement of Activity dan Cash Flow Statement. Tidak ada peraturan yang menyatakan laporan keuangan harus disajikan menggunakan bentuk akuntansi dana. Rumah sakit dapat memilih bentuk program, bentuk restriktif vs unrestrictif atau bentuk beban vs pengeluaran (penganggaran) dengan fleksibel sepanjang pengungkapan laporan posisi keuangan disajikan sesuai dan wajar bagi semua pihak.

Menurut PERDHAKE (Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia) laporan keuangan yang lengkap bagi entitas rumah sakit yang tidak memiliki ekuitas pemilik (nirlaba) terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Hasil Usaha, Laporan Aktivitas (Laporan Perubahan Aset Bersih), Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut PERDHAKE Laporan Posisi Keuangan menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset bersih serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan Hasil Usaha menyediakan informasi Perhitungan Hasil Usaha (kenaikan/penurunan) mencakup struktur entitas rumah sakit secara keseluruhan dan menyajikan perhitungan jumlah surplus atau minus selama periode tertentu. Laporan Aktivitas/Perubahan Aset Bersih mencakup struktur entitas rumah sakit secara keseluruhan dan menyajikan informasi penambahan atau pengurangan aset bersih atas kinerja entitas rumah sakit. Laporan Arus Kas memberikan

informasi mencakup struktur entitas rumah sakit secara keseluruhan dan penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Catatan atas Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai gambaran umum entitas rumah sakit, ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan, penjelasan pos-pos dari komponen laporan keuangan, pengungkapan hal-hal penting yang mempengaruhi entitas rumah sakit secara keseluruhan.

PERDHAKI adalah karya keschatan Keuskupan dan Kongregasi biarawan biarawati, yang kemudian membentuk organisasi unik yang menggabungkan kegiatan padat karya, padat teknologi, padat modal, dan menjalankan fungsi sosial bagi masyarakat. Laporan keuangan tersebut diberlakukan bagi entitas rumah sakit anggota PERDHAKI.

Menurut PSAK 45, Pernyataan standar akuntansi keuangan tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya. Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharuskan pembayaran kembali, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan Arus Kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Menurut SAP, Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Pelaporan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan akuntabilitas organisasi publik. Akuntabilitas pemerintah dibidang keuangan diwujudkan melalui laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan keuangan dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan financial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan financial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan financial.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitif yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu.

Selain itu, akuntabilitas pemerintah dibidang kinerja diwujudkan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui praktek akuntansi berupa pelaporan keuangan RSJ Soeharto Heerdjan tahun 2010-2013.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dimana sumber data diperoleh dari webside dan RSJ. Soeharto Heerdjan

PEMBAHASAN

Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan didirikan berdasarkan Keputusan Kerajaan Belanda (Koninklijkbesluit) tertanggal 30 Desember 1865 No. 100 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal (Gouverneur General) tertanggal 14 April 1867, namun pembangunannya baru dimulai pada tahun 1876.

Untuk menghilangkan stigma masyarakat, nama Rumah Sakit Jiwa Grogol diubah dengan nama Rumah Sakit Jiwa Jakarta pada tahun 1973, kemudian pada tahun 1993 diubah dengan nama Rumah Sakit Jiwa Pusat Jakarta dan terakhir pada tahun 2003 diubah lagi menjadi Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan sampai dengan sekarang.

Beberapa landasan hukum RS. Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta sebagai berikut:

1. Dasar hukum operasional rumah sakit jiwa adalah UU 24/2004 dan PP 23/2005 tentang PPK – BLU.
2. Kep.Menkes RI No. 765/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dep.Kes dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.
3. Peraturan Menkes RI No. 252/Menkes/Per/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan.

Profil Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan

Status : Rumah Sakit Pemerintah Pusat Pengguna PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Luas tanah : 64.850 m²
Luas bangunan : 23.070,38 m²

Kelas : Rumah Sakit Jiwa Kelas A untuk pelayanan kejiwaan dan disetarakan dengan Rumah Sakit Umum Kelas B untuk pelayanan fisik umum

Visi dan Misi Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan

Visi:

Menjadi pusat unggulan dalam pelayanan kesehatan jiwa perkotaan

Misi:

1. Melaksanakan Pelayanan Jiwa sesuai Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Tipe A
2. Melaksanakan Pendidikan Kesehatan Jiwa sesuai dengan Pedoman Rumah Sakit Pendidikan
3. Melaksanakan Penelitian Kesehatan Jiwa sesuai Pedoman Bioetika Kedokteran

Laporan Keuangan yang dibuat oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan

1. Laporan Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
ESKELON 04 DITJEN BINA PELAYANAN MEDIS
WILAYAH/PROVINSI 0100 PROP DKI JAKARTA
SATUAN KERJA 415454 RSJ DR. SOEHARTO HEERDJAN
JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	20.754.000.000	20.022.722.587	7.268.962.587	135,03
1	PENERIMAAN DALAM NEGERI	20.754.000.000	20.022.722.587	7.268.962.587	135,03
a	Penerimaan Pajak	0	0	0	0,00
b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	20.754.000.000	20.022.722.587	7.268.962.587	135,03
2	HIBAH	0	0	0	0,00
1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0,00
1	PENERIMAAN DALAM NEGERI NON KAS	0	0	0	0,00
a	Penerimaan Pajak Non Kas	0	0	0	0,00
b	Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0,00
2	HIBAH NON KAS	0	0	0	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A 1 + A 2)	20.754.000.000	20.022.722.587	7.268.962.587	135,03
B	BELANJA				
1	BELANJA TRANSAKSI KAS	67.824.512.000	62.487.401.179	(5.342.110.821)	82,12
	Belanja Pegawai	20.700.019.200	20.430.593.248	(269.425.952)	98,80
	Belanja Barang	42.254.194.000	37.899.823.622	(4.354.370.378)	89,70
	Belanja Modal	4.870.300.000	4.156.979.311	(713.320.689)	85,35
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00
	Subsidi	0	0	0	0,00
	Hibah	0	0	0	0,00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00
1	BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0,00
	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0,00
	Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0,00
	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0,00
	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0,00
	Subsidi Non Kas	0	0	0	0,00
	Hibah Non Kas	0	0	0	0,00
	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0,00
	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0,00
	JUMLAH BELANJA (B 1 + B 2)	67.824.512.000	62.487.401.179	(5.342.110.821)	82,12
C	PEMBAYARAN				
1	PEMBAYARAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00
a	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0,00
b	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0,00
2	PEMBAYARAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00
a	Perbankan Luar Negeri	0	0	0	0,00
b	Pembayaran Cukai Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0,00
	JUMLAH PEMBAYARAN (C 1 + C 2)	0	0	0	0,00

Jakarta, 16 Januari 2014

Direktur Utama


Seta Purnamasari SO KJ MARS
NIP. 196102201989021004

2. Pelaporan Keuangan tahun 2011

- Neraca per 31 Desember 2011 dan 2010 (dalam rupiah)

	Catatan	2011	2010
Aset			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	1a,3,20	4.823.862.370	4.132.661.612
Piutang usaha (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu 2011: Rp1.257.184.300; dan 2010: Rp86.718.756)	2d,4	4.761.145.883	2.741.967.039
Piutang lain-lain	2d,5	76.485.849	209.742.182
Sediaan	2e,6	12.680.475.690	13.749.030.696
Pajak dibayar di muka	2j,9a	-	-
		<u>22.341.969.792</u>	<u>20.833.401.529</u>
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap			
Harga perolehan	2g,7	386.107.442.197	376.579.351.807
Akumulasi penyusutan	2g,7	(27.818.716.374)	(25.223.769.802)
		<u>358.288.725.823</u>	<u>351.355.582.005</u>
Aset lainnya	8	259.160.000	-
		<u>358.547.885.823</u>	<u>351.355.582.005</u>
JUMLAH ASET		<u>380.889.855.615</u>	<u>372.188.983.534</u>
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Pendapatan diterima di muka	9	657.010.639	1.341.414.716
Utang pajak	2j,9b	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	11	-	159.594.200
		<u>657.010.639</u>	<u>1.501.008.916</u>
Ekuitas			
Ekuitas Awal	2g,2i,7	354.993.490.242	354.993.490.242
Surplus dan Defisit Tahun Lalu		15.694.484.376	8.722.510.313
Surplus dan Defisit Tahun Berjalan		9.544.870.358	6.971.974.063
Ekuitas Donasi		-	-
		<u>380.232.844.976</u>	<u>370.687.974.618</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>380.889.855.615</u>	<u>372.188.983.534</u>

Dari laporan keuangan di neraca jumlah aset dan jumlah liabilities dan ekuitas pada tahun 2010 dan 2011 laporan keuangan neraca balance.

- Laporan Aktivitas per 31 Desember 2011 dan 2010 (dalam rupiah)

	Catatan	2011	2010
PERUBAHAN ASET BERSIH			
Pendapatan operasional	2k,12	19.633.066.003	15.318.325.624
Pengurang pendapatan	2k,13	(858.738.632)	(310.994.992)
Jumlah pendapatan bersih setelah faktor pengurang		18.774.327.371	15.007.330.632
Pendapatan non operasional	2k,14	95.863.849	68.562.866
Sumbangan tidak terikat	2k,15	38.616.789.287	31.931.278.270
Jumlah pendapatan dan sumbangan tidak terikat		57.486.980.507	47.007.171.768
Beban dan kerugian operasional	2k,16	47.926.694.415	40.024.070.762
Beban non operasional	2k,17	15.415.734	11.126.943
		47.942.110.149	40.035.197.705
SURPLUS DAN DEFISIT TAHUN BERJALAN		9.544.870.358	6.971.974.063

Dari laporan aktivitas per 31 desember 2011 dan 2010 terjadi surplus dan defisit pada tahun berjalan.

- Laporan arus kas per 31 Desember 2011 dan 2010

	Catatan	2011	2010
ARUS KAS DARI AKTIVITAS USAHA			
Kas dari pendapatan jasa		16.495.988.527	14.634.441.539
Kas dari sumbangan tidak terikat APBN		38.616.789.287	31.931.278.270
Penerimaan lain-lain (sewa gedung)		95.863.849	68.562.866
Pembayaran/setoran ke kas Negara		(15.415.734)	(11.126.943)
		-	-
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan pemasok		44.923.334.781	41.229.312.657
Kas bersih diperoleh dari / (dipergunakan untuk) aktivitas usaha		10.269.891.148	5.393.843.075
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian aset tetap		-9.578.690.390	-3.598.955.170
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi		-9.578.690.390	-3.598.955.170
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Koreksi laba ditahan		-	-
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan		-	-
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas		691.200.758	1.794.887.905
Kas dan setara kas, awal tahun	2a,3,20	4.132.661.612	2.337.773.707
Kas dan setara kas, akhir tahun	2a,3,20	4.823.862.370	4.132.661.612

Dari laporan arus kas per 31 desember 2011 dan 2010 terjadi kenaikan pada di akhir tahun dari 2010 ke 2011.

3. Laporan Akuntabilitas Institusi Pemerintah (LAKIP)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan Jakarta Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.04/I/1568/12 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran 2013 ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja RS Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan Jakarta kepada Kementerian Kesehatan cq Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Unit Pelaksanaan Teknis dibidang pelayanan kesehatan khususnya, pelayanan kesehatan jiwa.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja RS Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan Jakarta selama tahun anggaran 2013. Capaian kinerja (*performance results*) 2013 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2013, sebagai tolok ukur keberhasilan satu tahun organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja(*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RS Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan Jakarta tahun anggaran 2013 terdiri atas Ringkasan Eksekutif, Pendahuluan, Rencana Strategis, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup. Berikut adalah cuplikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Rumah Sakit Jiwa Dr Soeharto Heerjan Jakarta.

Pengukuran capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta tahun anggaran 2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam indikator kinerja. Indikator kinerja utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi.

Pengukuran capaian kinerja ini adalah dimaksudkan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan dalam mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit sehingga dengan demikian akan diketahui faktor-faktor dan indikator-indikator yang berpengaruh didalam pencapaian Visi dan Misi.

Berikut adalah Capaian Kinerja Direktorat Keuangan Dan Administrasi Umum. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KEGIATAN		PENCAPAIAN TARGET KINERJA (%)
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	
Program Pemeliharaan Upaya Kesehatan	2090.018.001	Gedung dan Bangunan				
	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rupiah	2.573.904.000	2.255.751.000	87,64%
	533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor	Rupiah	60.000.000	-	0,00%
Kesehatan	533115	Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan				
		Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	Rupiah	205.150.000	193.998.475	94,56%
		Gedung dan Bangunan				
2094.018.001	Layanan Operasional Rumah Sakit (BLU)					
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	Rupiah	13.714.041.000	13.533.758.094	98,69%	
525112	Belanja Barang	Rupiah	309.511.000	308.310.806	99,61%	
525113	Belanja Jasa	Rupiah	292.000.000	224.000.000	76,71%	
525114	Belanja Pemeliharaan	Rupiah	6.000.000	-	0,00%	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	Rupiah	1.996.199.000	1.566.598.950	78,48%	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rupiah	1.453.655.000	1.453.041.330	99,96%	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	Rupiah	23.000.000	21.254.200	92,41%	
2094.028.001	Peningkatan SDM					
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	Rupiah	1.302.100.000	935.170.100	71,82%	
2094.029.001	Pengadaan Bahan Makanan					
521112	Belanja pengadaan bahan makanan	Rupiah	2.617.050.000	2.054.677.700	78,51%	
525112	Belanja Barang	Rupiah	571.224.000	586.262.500	67,62%	
2094.031.001	Pakaian Dinas					
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rupiah	232.850.000	189.904.000	81,56%	
525112	Belanja Barang	Rupiah	30.680.000	-	0,00%	

2094.034.001	Obat-obatan dan Alat Medik Habis Pakai						
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rupiah	6.745.639.000	6.677.068.170	98,98%		
525112	Belanja Barang	Rupiah	500.000.000	100.150.276	20,03%		
2094.039.001	Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi						
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rupiah	555.650.000	544.234.306	97,95%		
2094.994.001	Layanan Perkantoran						
001	Belanja Pegawai	Rupiah	20.700.019.000	20.450.598.246	98,80%		
002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran						
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rupiah	3.838.274.000	3.760.439.551	84,95%		
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rupiah	1.199.352.000	1.081.052.300	90,14%		
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	Rupiah	150.120.000	128.760.000	85,77%		
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rupiah	270.224.000	97.194.500	35,97%		
521211	Belanja Bahan	Rupiah	1.261.500.000	977.250.231	77,47%		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rupiah	400.000.000	397.281.900	99,32%		
522111	Belanja Langganan Listrik	Rupiah	1.410.000.000	1.153.188.384	81,79%		
522112	Belanja Langganan Telepon	Rupiah	72.000.000	35.382.457	49,14%		
522113	Belanja Langganan Air	Rupiah	120.000.000	55.986.646	46,66%		
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rupiah	144.000.000	133.025.520	92,38%		
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Barangman	Rupiah	2.387.200.000	2.177.797.884	91,23%		
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rupiah	1.538.230.000	1.418.099.698	92,19%		
523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	Rupiah	700.000.000	279.766.255	39,97%		
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rupiah	50.000.000	0	0,00%		
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	Rupiah	400.000.000	397.397.700	99,35%		

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

PROGRAM	KEGIATAN						
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA	
						(%)	
1	2	3	4	5	6	7	
Pembinaan Upaya Kesehatan	Penerimaan	Input :					
		Jumlah		20.754.060.000	28.022.722.587	135,02%	
		Penerimaan					
		Output :					
		Terwujudnya jumlah Penerimaan					
		1. UMUM			2.840.092.377		
		2. JAMKESMAS			379.603.416		
		3. JAMKESMASDA			834.794.324		
		TKI					
		4. ASKES			1.727.353.829		
	5. GAKIN/SKTM			20.770.107.806			
	6. Jasa Lainnya			1.470.770.835			

Berdasarkan informasi tersebut bahwa target penerimaan tercapai untuk tahun anggaran 2013 sebesar 135,02%, walaupun demikian ada beberapa kendala dalam peningkatan pendapatan sebagai berikut:

- Pelayanan RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta belum optimal.
- Stigma negative tentang keberadaan RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta sampai saat ini masih melekat pada masyarakat sehingga masyarakat enggan memanfaatkan pelayanan yang ada di RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta.
- Pembayaran claim yang terlambat dari pihak III (pemberi jaminan).
- Billing System belum berjalan dengan baik sehingga menjadi kendala dalam pencatatan keuangan.
- Belum adanya SK Dirjen Bina Upaya Kesehatan untuk pelancon Non Psikiatri, sehingga RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta belum dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai penjamin pembayaran dalam pelayanan non psikiatri.

Adapun upaya yang akan dilakukan dalam rangka mempercepat proses peningkatan penyerapan anggaran, sebagai berikut:

- Melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta, guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), penanggung-jawab kegiatan, serta unsur unit kerja yang terkait.

Berdasarkan capaian-capaian kinerja dibuat ringkasan Eksekutif Laporan Kinerja RSJ Soeharto Heerdjan sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program peningkatan mutu melalui komite & bidang, belum berjalannya program sesuai Review pedoman SOP rumah sakit, belum terlaksanakannya beberapa survey kepuasan pelanggan serta belum terlaksanakannya pengembangan SIMRS.

Upaya terus dilakukan untuk mencapai visi dan misi yang di emban adalah intensifikasi program pemasaran rumah sakit, pelayanan pendampingan pasien/ *Customer Care*, Optimalisasi pelayanan bangsal perawatan, serta membangun jejaring pelayanan yang terintegrasi seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dan luar DKI.

Dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mengedepankan akuntabilitas publik maka pelaksanaan penyelenggaraan kinerja RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta tahun 2013 harus dapat dipertanggung jawabkan pada publik. Dalam konteks ini menjadi penting adanya alat ukur atau indikator yang bisa di jadikan dasar penilaian penetapan kinerja yaitu dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta Tahun Anggaran 2013.

Capaian target layanan medik dapat di uraikan: capaian kunjungan Poli Psikiatri Dewasa tercapai 110,52%, capaian Hari Rawat tercapai 90,19 %, Capaian kunjungan Poli Psikiatri Anak dan Remaja 134,14%, capaian pelayanan Poli Gigi 79,46 % Capaian kunjungan Day Care 157,60 %, capaian kunjungan IGD 90,05 %, capaian pelayanan Laboratorium 117,53 %, capaian pemeriksaan Radiologi 97,92 %, capaian kunjungan EKG 99,09 %, capaian kunjungan Rehabilitasi Psikososial 132,30 %, capaian kegiatan Farmasi 109,08%, dan capaian konsultasi Gizi 69,62 %.

Tingkat hunian BOR (*Bid Occupancy Rate*) tercapai 87,85 %, tingkat capaian untuk kelas VIP adalah 72,40%, kelas I adalah 71,90%, kelas II adalah 79,20% dan kelas III adalah 90,04 % dan BOR ini telah memenuhi Fungsi rumah sakit mengemban fungsi sosial sebagai Badan Layanan Umum.

Beberapa pengembangan pelayanan yang telah di laksanakan, antara lain : Pelayanan Poli Eksekutif, Pelayanan MHCU (Medical Check-Up Kesehatan Jiwa) dan Pelayanan Napza.

Capaian penerimaan rumah sakit sebesar Rp 28.022.722.587,- dari target Rp 20.754.060.000,- (135,02%) capaian penyerapan anggaran sebesar Rp 62.487.401.179,- (92,12%) dari total pagu anggaran Rp 67.829.572.000,-.

Permasalahan yang di hadapi antara lain belum tercapainya BOR Kelas VIP dan Kelas I hal ini disebabkan adanya renovasi ruang perawatan Kelas VIP dan Kelas I, belum optimalnya program pemasaran rumah sakit, belum optimal.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

1. RSJ Soeharto Heerdjan adalah entitas pemerintah, RS –Badan Layanan Umum, Depkes selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN), RSJ Soeharto Heerdjan adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya akan dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya yaitu Departemen Kesehatan

2. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan Layanan Umum, RSJ Soeharto Heerdjan adalah entitas pelaporan.
3. Selaku entitas pelaporan RSJ Soeharto Heerjan membuat laporan keuangan sesuai SAP yang terdiri dari Laporan Keuangan Pokok dan Laporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. RSJ Soeharto Heerjan membuat Laporan Keuangan Pokok sehubungan dengan anggaran yaitu :
 - Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk semester yang berakhir tanggal 31 Desember.
5. RSJ Soeharto Heerjan membuat Laporan Keuangan Pokok sehubungan dengan Laporan
 - Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember
 Laporan Keuangan ini kemudian diaudit oleh Auditor Ekstern, dimana pada tahun 2011 Laporan diaudit KAP Heliantonno & Rekan
6. RSJ Soeharto Heerjan juga membuat Laporan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan yaitu :
 - Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
7. Pelaporan keuangan yang dibuat RSJ Soeharto Heerdjan diatas yaitu, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan pelaporan keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali Laporan Kegiatan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 45 pengganti Laporan Operasional.
8. Disamping itu sesuai dengan SAP untuk penilaian kinerja RSJ Soeharto Heerjan membuat laporan kinerja berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP) untuk mengkomunikasikan capaian kinerja (performance result) dengan penetapan kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta kepada Kementerian Kesehatan cq Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
9. RSJ Soeharto Heerjan mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah melalui pembuatan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah pembuatan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
10. RSJ Soeharto Heerjan mengimplementasikan PSAK No 45 melalui pembuatan Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan

Keuangan yang dipublikasikan yang diaudit yaitu:

- Neraca per 31 Desember
- Laporan Aktivitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
- Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember

10. RSJ Soeharto Heerjan mengimplementasikan PSAK No 45 melalui pembuatan Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, *Akuntansi Kesehatan*. Penerbit Erlangga 2008.
- Bastian, Indra, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Penerbit Erlangga 2007.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan per Juni 2012*, Ikatan Akuntan Indonesia
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor publik*, Penerbit Andi 2005 Yogyakarta
- Nordiawan, Deddy dan Hertianti, Ayuningtyas, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat 2010.
- Fokusmedia, *Peenerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*, Penerbit Fokusmedia 2004.
- Plank, Tom M and Plank, Lois R, *Encyclopedia of Accounting Systems*, Second Edition Volume 2
- Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2007, *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*, Penerbit Pustaka Pergaulan 2007
- PP RI No 71 Tahun 2010, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Fokusmedia
- Rochmanaji Widajat, *Being a great and sustainable Hospital*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 2009
- Tim Penyusun Buku Akuntansi PERDHAKI, *Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Anggota PERDHAKI*, Nera Pustaka 2011

Rumah Sakit Jiwa DR Soeharto Heerjan, (http://www.google.com/webhp?hl=en&gws_rdssl#hl=en&q=rj+soeharto&spell=1)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Dr Soeharto Heerdjan Jakarta (www.rsjh.com/files/biskitz/post_/lakip_ta_2013.pdf)

www.investorwords.com/3947/public_sector.html

www.investorwords.com/48/accounting.html

Wikipedia Bahasa Indonesia